

ABSTRACT

AN ANALYSIS ON COLLABORATIVE GOVERNANCE IN THE IMPLEMENTATION OF THE FOREST AND LAND REHABILITATION (RHL) POLICY IN THE LEMAU WATERSHED, CENTRAL BENGKULU REGENCY

By:

Aulia Oliviani

2263201051

This study aims to analyze the process of Collaborative Governance in the implementation of the Forest and Land Rehabilitation (RHL) policy in the Lemau Watershed (DAS), Central Bengkulu Regency, and to identify the factors that influence its implementation. The study is motivated by the degraded condition of the Lemau watershed, where most forest areas have experienced a decline in vegetation cover, requiring rehabilitation efforts that involve multiple stakeholders.

This research uses a descriptive method with a qualitative approach. Data were obtained through observation, in-depth interviews with eight informants, and documentation studies, then analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldana, comprising data condensation, data display, and conclusion drawing. The analysis was based on five indicators of Collaborative Governance according to Noor, Suaedi, and Mardiyanta (2022): stakeholder engagement, shared goals, communication, trust, and role division.

The results show that these five indicators have generally been fulfilled at the administrative-formal and institutional level. BPDAS Ketahun, the Bengkulu Provincial Environmental and Forestry Agency (DLHK), UPTD KPHL Bukit Daun, farmer groups, and supporting actors such as KHDTK Universitas Muhammadiyah Bengkulu and MAPEL Bengkulu have carried out their respective roles through socialization, coordination, and formal agreement mechanisms. However, the collaboration built remains dominated by interaction among bureaucratic institutions and assisted farmer groups, while broader community involvement and integration with non-governmental initiatives have not been optimal. This study recommends expanding cross-actor coordination networks and strengthening technical mentoring so that the implementation of RHL in the Lemau watershed can become more inclusive and sustainable.

Keywords: Collaborative Governance, Forest and Land Rehabilitation, Watershed, Central Bengkulu, Stakeholder Collaboration

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Lingkungan hidup merupakan salah satu unsur penting yang mendukung keberlangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, keberadaan lingkungan yang terjaga menjadi faktor utama dalam mendukung keseimbangan ekosistem, ketersediaan sumber daya alam, serta keberlanjutan pembangunan, oleh karena itu, upaya pelestarian lingkungan menjadi tanggung jawab bersama yang harus dilakukan secara berkelanjutan agar fungsi lingkungan tetap terjaga (Alfian et al., 2020).

Seiring dengan meningkatnya aktivitas manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam, berbagai permasalahan lingkungan mulai muncul dan berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan (Irianto, 2006). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan memerlukan perhatian yang serius agar keberlanjutan fungsi lingkungan dapat dipertahankan.

Salah satu bentuk permasalahan lingkungan yang masih banyak dijumpai adalah kerusakan hutan dan lahan yang terjadi akibat berbagai aktivitas, seperti perubahan penggunaan lahan, pembukaan kawasan hutan, serta pemanfaatan sumber daya alam yang kurang memperhatikan prinsip keberlangsungan atau keberlanjutan ekosistem, kondisi tersebut menyebabkan turunnya kualitas lingkungan dan berkurangnya kemampuan hutan maupun lahan dalam menjalani fungsi ekologisnya (Lusiana et al., 2021). Oleh karena itu diperlukan langkah langkah yang mampu memulihkan kondisi hutan dan lahan.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam memulihkan kondisi hutan dan lahan yang mengalami kerusakan adalah melalui Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), program ini merupakan bentuk intervensi pemerintah yang bertujuan memperbaiki kondisi biofisik hutan dan lahan agar kembali berfungsi secara optimal, pelaksanaan RHL tidak hanya berorientasi pada penanaman vegetasi, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan serta menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya alam (Agustinus et al., 2013).

Pelaksanaan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Indonesia didasarkan pada berbagai kebijakan yang mengatur penyelenggaraan rehabilitasi sebagai upaya pemulihan kondisi hutan dan lahan, salah satu dasar hukum yang menjadi pedoman pelaksanaan RHL adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2021 yang mengatur penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Peraturan tersebut menegaskan bahwa rehabilitasi hutan dan lahan bertujuan memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan manfaat ekologis, ekonomi, dan sosial bagi masyarakat.

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pada dasarnya tidak hanya bertujuan untuk memulihkan kondisi hutan dan lahan yang mengalami kerusakan, tetapi juga diarahkan untuk mengembalikan fungsi lingkungan agar dapat berjalan secara optimal, Pelaksanaan RHL diharapkan mampu meningkatkan daya dukung lahan, memperbaiki kualitas tutupan vegetasi, serta menjaga keseimbangan ekosistem secara berkelanjutan. Selain itu, rehabilitasi juga menjadi salah satu langkah dalam mengurangi tingkat degradasi lahan yang dapat memengaruhi fungsi lingkungan (Gitahapsari & Zarkasyi Rahman, 2016).

Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) memiliki keterkaitan yang erat dengan upaya menjaga dan memulihkan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS). Hal ini karena kondisi hutan dan lahan yang berada di dalam suatu DAS berpengaruh terhadap kemampuan DAS dalam menjalankan fungsi hidrologis, ekologis, maupun lingkungan secara keseluruhan. Semakin baik kondisi tutupan vegetasi pada suatu kawasan, maka semakin baik pula kemampuan DAS dalam menjaga keseimbangan tata air serta kualitas lingkungan (Rindi Yuliyanti, 2022).

Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan suatu wilayah daratan yang secara alami dibatasi oleh punggung bukit atau pegunungan yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air hujan menuju sungai utama hingga bermuara ke laut, Keberadaan DAS memiliki peranan penting sebagai satu kesatuan ekosistem yang mendukung berbagai fungsi lingkungan, baik dari aspek hidrologis, ekologis, maupun sosial ekonomi (Kadir et al., 2020). Oleh sebab itu, kondisi DAS perlu dijaga agar tetap mampu menjalankan fungsinya secara optimal, Menurunnya kualitas kawasan dalam suatu DAS dapat memengaruhi keseimbangan ekosistem serta keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam yang berada di dalamnya.

Salah satu Daerah Aliran Sungai (DAS) yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan adalah DAS Lemau yang berada di Provinsi Bengkulu. DAS Lemau memiliki peranan penting sebagai kawasan yang mendukung fungsi hidrologis dan keseimbangan lingkungan di wilayah sekitarnya. Oleh karena itu, kondisi DAS Lemau perlu terus dijaga agar fungsi ekologis dan hidrologisnya tetap berjalan secara optimal. Upaya rehabilitasi hutan dan lahan di DAS Lemau menjadi salah satu langkah yang dilakukan untuk

memulihkan kondisi kawasan sekaligus mendukung keberlanjutan fungsi DAS tersebut (Ditya Permana & L Vini Siregar, 2022).

Daerah Aliran Sungai (DAS) Lemau merupakan salah satu DAS yang berada di Provinsi Bengkulu dan memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan fungsi hidrologis, ekologis, serta mendukung keberlanjutan lingkungan di wilayah sekitarnya. Sebagai salah satu DAS yang menjadi lokasi pelaksanaan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), kondisi DAS Lemau perlu mendapatkan perhatian agar fungsi lingkungan tetap terjaga. Oleh karena itu, berbagai upaya rehabilitasi terus dilakukan sebagai bagian dari pemulihan kondisi hutan dan lahan di kawasan DAS Lemau.

Gambar 1.1

Kondisi Hutan dan Lahan DAS Lemau		
Indikator	Kondisi	Keterangan
Luas DAS Lemau	51.581,5 Ha	–
Luas kawasan hutan	11.045 Ha	–
Persentase kawasan hutan terhadap luas DAS	21,4%	11.045 Ha dari 51.581,5 Ha
Kondisi kawasan hutan tidak berhutan	10.350,2 Ha	93,7% dari luas kawasan hutan
Kondisi lahan (berdasarkan analisis RPDAS)	Terdapat wilayah dengan kategori lahan kritis	Memerlukan kegiatan RHL

Sumber: RPDAS Lemau BPDAS Ketahun (2022)

Berdasarkan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Lemau Tahun 2022, DAS Lemau memiliki luas sekitar 51.581,5 hektare. Dari luas tersebut, kawasan hutan hanya mencakup sekitar 11.045 hektare atau sekitar 21,4% dari total luas DAS. Selain itu, sekitar 10.350,2 hektare atau 93,7% kawasan hutan berada dalam kondisi tidak berhutan. Data tersebut menunjukkan bahwa kondisi tutupan kawasan hutan di DAS Lemau mengalami penurunan sehingga memerlukan upaya pemulihan untuk mengembalikan fungsi kawasan secara berkelanjutan.

Menurunnya kondisi tutupan kawasan hutan di DAS Lemau berpotensi memengaruhi kemampuan kawasan dalam menjalankan fungsi hidrologis dan ekologis. Berkurangnya vegetasi menyebabkan kemampuan kawasan dalam menyerap dan menyimpan air menjadi menurun serta dapat meningkatkan potensi degradasi lahan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa rehabilitasi hutan dan lahan menjadi salah satu upaya yang diperlukan untuk memperbaiki kualitas kawasan sekaligus mendukung pemulihan fungsi DAS. Dengan demikian, pelaksanaan Kebijakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) menjadi langkah yang penting dalam menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan di DAS Lemau.

Pelaksanaan Kebijakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di DAS Lemau tidak hanya berorientasi pada kegiatan penanaman, tetapi juga merupakan bagian dari upaya pemulihan kondisi kawasan secara berkelanjutan. Keberhasilan pelaksanaan program tersebut sangat dipengaruhi oleh proses penyelenggaraan yang mampu mengintegrasikan berbagai aspek dalam pelaksanaan rehabilitasi sehingga tujuan program dapat tercapai secara optimal.

Pelaksanaan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) merupakan salah satu program yang memiliki ruang lingkup cukup luas, sehingga dalam penyelenggaraannya tidak dapat dilakukan secara parsial. Program ini memerlukan keterpaduan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan agar tujuan rehabilitasi dapat tercapai secara optimal (Surtiani & Budiati, 2015). Selain itu, keberhasilan pelaksanaan program juga dipengaruhi oleh adanya sinergi dalam pelaksanaan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan rehabilitasi hutan dan lahan. Oleh karena itu, pelaksanaan RHL memerlukan pengelolaan yang baik agar seluruh tahapan kegiatan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan suatu program publik, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh tersedianya kebijakan maupun sumber daya, tetapi juga dipengaruhi oleh proses pelaksanaannya. Program yang melibatkan berbagai kepentingan umumnya membutuhkan adanya keselarasan dalam pelaksanaan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara optimal (Susilowati et al., 2022). Apabila proses tersebut tidak berjalan dengan baik, maka pelaksanaan program berpotensi menghadapi berbagai kendala yang dapat memengaruhi efektivitas pencapaian tujuan program. Oleh sebab itu, pelaksanaan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan memerlukan pengelolaan yang mampu menciptakan sinergi dalam pelaksanaan program (Agustinus et al., 2013).

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk memahami proses kerja sama dalam pelaksanaan suatu program publik adalah *Collaborative governance*. Pendekatan ini memandang bahwa penyelenggaraan program publik memerlukan proses kolaborasi yang mampu mengintegrasikan berbagai kepentingan dalam mencapai tujuan bersama (Noor et al., 2022). Melalui *Collaborative governance*, pelaksanaan program tidak hanya dipahami dari aspek kebijakan, tetapi juga dari proses kolaborasi yang terjadi selama program tersebut berlangsung. Dengan demikian, pendekatan ini dinilai relevan untuk digunakan dalam mengkaji pelaksanaan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan di DAS Lemau.

Penelitian ini memfokuskan analisis pada kegiatan Penguatan Kelembagaan Masyarakat/Prakondisi Rehabilitasi Hutan dan Lahan tahun 2025 sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan RHL di DAS Lemau. Kegiatan ini meliputi koordinasi, penguatan kelembagaan, sosialisasi, dan penyusunan kesepakatan antar *stakeholder* sebagai tahap persiapan sebelum pelaksanaan rehabilitasi

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pelaksanaan Kebijakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di DAS Lemau merupakan upaya yang penting dalam mendukung pemulihan kondisi hutan dan lahan serta menjaga keberlanjutan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS). Namun, keberhasilan pelaksanaan program tersebut memerlukan proses pelaksanaan yang mampu menciptakan sinergi sehingga tujuan rehabilitasi dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana *Collaborative governance* dalam Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Berbasis DAS Lemau di Kabupaten Bengkulu Tengah, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kolaborasi dalam mendukung keberhasilan program tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini merumuskan masalah yaitu: “Bagaimana *Collaborative governance* dalam kebijakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai (DAS) Lemau di Kabupaten Bengkulu Tengah?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Menganalisis proses *Collaborative governance* dalam kebijakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Daerah Aliran Sungai Lemau di Kabupaten Bengkulu Tengah
2. Untuk Mengetahui apa saja faktor faktor yang mempengaruhi pelaksanaan

Collaborative governance dalam kebijakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Daerah Aliran Sungai Lemau di Kabupaten Bengkulu Tengah

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis dan juga praktis. Secara terinci manfaat penelitian yang diharapkan yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya yang berkaitan dengan *Collaborative governance* dalam kebijakan lingkungan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan kajian ilmiah mengenai pelaksanaan *Collaborative governance* dalam kebijakan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL).

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah sebagai bahan masukan dalam meningkatkan pelaksanaan *Collaborative governance* dalam kebijakan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) pada DAS Lemau di Kabupaten Bengkulu Tengah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam mendukung keberhasilan RHL pada DAS . Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam mengkaji *Collaborative governance* pada kebijakan lingkungan, khususnya yang berkaitan dengan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL)